

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal: peran pemerintah daerah dalam mengelola Taman Kota Asembagus, dan kualitas taman tersebut sebagai ruang terbuka publik. Kerangka analisis yang digunakan merujuk pada konsep peran pemerintah sebagai controller (Perkasa, 2021) dengan tiga dimensi manajerial yakni pengawasan, pengendalian, dan evaluasi; serta tiga fungsi taman kota menurut Sukawi (2008) yakni fungsi lanskap, fungsi pelestarian lingkungan, dan fungsi estetika. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui DLH dalam mengelola Taman Kota Asembagus pada ketiga dimensi manajerial secara keseluruhan tergolong rendah. Dari sembilan indikator yang ditetapkan, hanya dua yang terpenuhi secara penuh.

Pada dimensi pengawasan, merujuk pada konsep Siagian (2005) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang ditetapkan, pengawasan DLH belum memenuhi standar tersebut. Penempatan petugas lapangan yang bekerja setiap hari merupakan indikator positif, namun cakupan waktu yang hanya efektif di pagi hari menjadikan pengawasan bersifat reaktif dan tidak menjangkau malam hari ketika vandalisme dan penyalahgunaan fasilitas justru paling sering terjadi. Ketiadaan dasar hukum tata tertib taman menyebabkan pemerintah tidak dapat memberikan

sanksi kepada pelaku, sehingga fungsi pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti secara preventif.

Pada dimensi pengendalian, merujuk pada Terry (2006) bahwa pengendalian adalah proses penetapan standar, penilaian pelaksanaan, dan koreksi terhadap penyimpangan, mekanisme pengendalian DLH atas Taman Kota Asembagus belum berjalan secara menyeluruh. Perizinan formal untuk kegiatan resmi memang tersedia, namun pengelolaan PKL yang beroperasi setiap malam justru tidak berada di bawah kendali DLH, melainkan diatur secara informal oleh pemerintah desa. Kondisi ini menimbulkan dualisme kewenangan yang belum terselesaikan dan melemahkan kapasitas pengendalian pemerintah atas ruang publik tersebut. Keterbatasan anggaran yang memaksa pemeliharaan 12 RTH dilakukan secara bergiliran melalui mekanisme RPJMD juga menjadi hambatan struktural dalam pemenuhan standar minimal pengelolaan taman.

Pada dimensi evaluasi, merujuk pada Dunn (2003) bahwa evaluasi adalah penilaian sistematis dan empiris terhadap efek suatu kebijakan dalam hubungannya dengan tujuan yang ditetapkan, evaluasi yang dilakukan DLH belum memenuhi kriteria tersebut secara penuh. Rapat koordinasi pengawas lapangan yang berjalan rutin memang menunjukkan adanya mekanisme evaluasi internal, namun cakupannya terbatas pada aspek operasional harian. Survei kepuasan pengguna tidak pernah dilakukan, sehingga perspektif masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak oleh kualitas taman sama sekali belum menjadi bagian dari siklus evaluasi pemerintah.

Kedua, kualitas Taman Kota Asembagus sebagai ruang terbuka publik mengalami penurunan yang signifikan jika diukur menggunakan tiga fungsi taman kota menurut Sukawi (2008).

Dari sisi fungsi lanskap, taman masih menjalankan fungsi fisik dan psikologisnya secara memadai berkat kehadiran pohon-pohon besar yang memberikan kenyamanan termal dan udara segar, serta menjadi ruang bagi beragam aktivitas sosial komunitas yang masih berlangsung rutin seperti senam lansia, Car Free Day, dan lomba. Namun fungsi sosial taman terancam oleh rusaknya fasilitas olahraga dan kamar mandi yang tidak kunjung diperbaiki, yang bertentangan dengan prinsip ruang publik yang responsive menurut Carr (1992), yakni bahwa ruang publik harus mampu melayani kebutuhan dasar penggunanya.

Dari sisi fungsi pelestarian lingkungan, vegetasi taman masih mampu menyediakan iklim mikro yang lebih segar dan meredam polusi udara sebagaimana fungsi ekologis yang digariskan Sukawi (2008). Namun permasalahan sampah yang berserakan terutama setelah aktivitas malam hari menjadi tantangan yang belum tertangani, yang menunjukkan bahwa fungsi pelestarian lingkungan tidak dapat berjalan optimal tanpa pengendalian perilaku pengguna yang memadai dari pihak pengelola.

Dari sisi fungsi estetika, taman mengalami penurunan paling signifikan. Hilangnya elemen identitas visual berupa tulisan ikonik "Asembagus The Second City" yang kini hanya menyisakan dua huruf, pencahayaan yang tidak memadai di area tengah taman, serta fasilitas yang rusak dan dibiarkan tanpa perbaikan dalam

jangka waktu panjang, semuanya bertentangan dengan kriteria kenyamanan visual yang menjadi syarat kualitas ruang publik menurut Jan Gehl (dalam Praliya dan Garg, 2019). Minimnya pencahayaan bahkan berdampak ganda: merusak estetika sekaligus menciptakan rasa tidak aman bagi pengunjung di malam hari.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya peran pemerintah daerah dalam ketiga dimensi manajerial memiliki korelasi langsung dengan menurunnya kualitas Taman Kota Asembagus pada ketiga fungsinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Handoko (2014) bahwa pengawasan yang efektif bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan harus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ketika standar tersebut tidak terdefinisi melalui regulasi, dan ketika evaluasi tidak menyentuh perspektif pengguna, maka peran pemerintah, meskipun secara formal berjalan, tidak cukup untuk menjaga kualitas ruang publik yang berkelanjutan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tanpa integrasi antara desain, pengelolaan, dan pemanfaatan taman secara menyeluruh sebagaimana ditekankan oleh Francis dan Hester (1990), sebuah ruang publik tidak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Rencana rehabilitasi pada tahun 2026 merupakan momentum penting yang perlu dimanfaatkan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membenahi sistem tata kelola taman secara fundamental agar Taman Kota Asembagus dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai ruang terbuka publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

#### **4.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur ilmiah yang berlaku. Namun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diakui agar pembaca dapat memahami ruang lingkup dan batas keberlakuan temuan penelitian ini.

Pertama, penelitian ini hanya melibatkan tiga belas narasumber yang terdiri dari pejabat DLH, pengawas lapangan, pengunjung, dan pedagang. Pihak-pihak lain yang turut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Taman Kota Asembagus, seperti unsur Pemerintah Kecamatan Asembagus, Satuan Polisi Pamong Praja, DPRD Kabupaten Situbondo, maupun komunitas masyarakat yang aktif menggunakan taman, tidak dilibatkan secara langsung sebagai narasumber. Ketidakhadiran perspektif dari aktor-aktor tersebut berpotensi membuat gambaran penelitian menjadi kurang menyeluruh, khususnya dalam memahami relasi kewenangan lintas sektor yang ditemukan dalam temuan mengenai dualisme pengelolaan PKL antara DLH dan pemerintah desa.

Kedua, observasi lapangan dalam penelitian ini dilakukan pada siang dan sore hari, sehingga kondisi taman pada malam hari tidak teramati secara langsung oleh peneliti. Padahal, berdasarkan temuan wawancara, permasalahan yang paling signifikan justru terjadi pada malam hari, yakni penerangan yang minim, potensi tindakan asusila, vandalisme, dan penumpukan sampah pascaaktivitas PKL. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian kondisi taman hanya dapat direkam melalui penuturan narasumber, bukan melalui pengamatan langsung peneliti.

Ketiga, penelitian ini tidak dapat memperoleh data rinci mengenai besaran anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pemeliharaan Taman Kota Asembagus secara spesifik. Informasi yang diperoleh hanya bersumber dari pernyataan narasumber secara umum, yakni bahwa anggaran DLH terbatas dan dikelola secara bergilir untuk 12 RTH di bawah pengelolaannya. Ketiadaan data anggaran yang konkret menyebabkan peneliti untuk tidak dapat menganalisis hubungan antara alokasi fiskal dan kualitas pemeliharaan taman secara lebih mendalam.

Keempat, penelitian ini menggunakan metode studi kasus tunggal pada satu objek, yaitu Taman Kota Asembagus di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke taman kota lain di daerah yang berbeda. Meskipun demikian, temuan ini dapat dijadikan referensi komparatif bagi penelitian serupa di daerah dengan karakteristik fiskal dan kelembagaan yang sejenis, khususnya kabupaten kecil dengan keterbatasan anggaran RTH.

Kelima, data mengenai kualitas taman dalam penelitian ini diperoleh dari pengunjung yang ditemui peneliti di lapangan secara insidental, bukan melalui teknik sampling yang terstruktur. Dengan demikian, perspektif yang terekam cenderung mewakili kelompok pengguna aktif dan rutin, sementara suara dari kelompok masyarakat yang sebelumnya sering mengunjungi taman namun kini tidak lagi datang justru menjadi yang paling relevan untuk memahami penurunan minat kunjungan, tetapi tidak tertangkap dalam penelitian ini.